

KUDETA MILITER DI MYANMAR: UJIAN BAGI ASEAN

Rizki Roza

7

Abstrak

Militer Myanmar kembali mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan sipil. Kudeta pada 1 Februari 2021 tersebut menjadi langkah mundur bagi upaya demokratisasi yang belum lama dijalankan Myanmar. Rakyat Myanmar protes dan turun ke jalan, dan militer merespons dengan mengerahkan kekuatan serta berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Perkembangan ini memicu kecaman sebagian masyarakat internasional, dan desakan terhadap ASEAN untuk berperan lebih aktif mengembalikan keadaan normal. Tulisan ini membahas upaya yang mungkin dilakukan ASEAN. Kudeta setidaknya mencerminkan ketidaksiapan militer untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada pemerintahan sipil. Sejauh ini, kudeta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing tampak lebih lunak dibanding yang pernah terjadi sebelumnya. Militer juga cenderung lebih terbuka dengan dunia luar. Ini peluang yang bisa dimanfaatkan ASEAN untuk berperan lebih aktif, dengan syarat ASEAN berani lebih fleksibel dengan prinsip non-intervensi. Pemerintah dan DPR RI dapat mendorong ASEAN menuju kesamaan sikap demi tujuan organisasi yang lebih luas.

Pendahuluan

Menjelang sidang perdana parlemen hasil pemilihan umum November 2020, militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan. Militer menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta sejumlah tokoh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Myanmar yang belum lama memulai masa transisi menuju demokrasi, pada 1 Februari 2021 kembali dikuasai militer.

Kudeta tersebut memicu unjuk rasa besar-besaran yang disertai mogok kerja di berbagai wilayah Myanmar. Berbagai elemen

rakyat Myanmar turun ke jalan dan menyatakan penolakan atas kudeta. Masyarakat internasional juga merespons dan mencermati, termasuk pemerintah Indonesia. Tidak hanya mencermati perkembangan di Myanmar, masyarakat internasional juga menyoroti peran ASEAN.

Sebagai organisasi kawasan, berkembang harapan agar ASEAN dapat berperan lebih aktif untuk mengembalikan demokrasi dan kekuasaan sipil di Myanmar. Bagaimana ASEAN bisa merespons harapan masyarakat internasional, akan dibahas dalam tulisan ini dengan terlebih dahulu berupaya memahami



arah politik yang diinginkan militer melalui kudeta. Pemahaman ini dapat menjadi dasar pertimbangan langkah yang perlu diambil ASEAN, termasuk Indonesia.

Pasang Surut Demokrasi Myanmar

Pengambil-alihan kekuasaan sipil oleh militer bukan merupakan hal baru di Myanmar. Militer Myanmar memiliki catatan sejarah cukup panjang dalam kehidupan politik dalam negeri Myanmar. Militer pernah menguasai pemerintahan Myanmar selama puluhan tahun, dan sepanjang masa itu pula berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta terhadap pemerintahan semi-demokrasi pada tahun 1962 menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar.

Para aktivis mahasiswa Myanmar memimpin protes besar pada tahun 1988 untuk merespons salah urus ekonomi oleh junta militer dan menuntut reformasi menuju demokrasi. Aksi pada 8 Agustus 1988 yang dikenal sebagai Perlawanan 8888 kemudian tercatat sebagai salah satu aksi dengan kekerasan paling brutal oleh aparat keamanan. Sekitar 5000 orang dilaporkan tewas akibat kekerasan oleh militer. Di tahun itu pula Suu Kyi mendirikan NLD dan mulai menekan pemerintahan militer untuk mengadakan pemilihan umum yang demokratis.

Mendapat tekanan domestik dan internasional, tahun 1990 Myanmar mengadakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD. Junta militer menolak hasil tersebut dan menerapkan tahanan rumah kepada Suu Kyi. Untuk mempertahankan kendali militer atas pemerintahan, Tatmadaw (militer Myanmar) menyusun konstitusi baru

yang di antaranya menetapkan 25% kursi parlemen nasional dan lokal untuk pejabat militer. Berlandaskan konstitusi itu, pemilu kembali diselenggarakan tahun 2011 yang dimenangkan *Union Solidarity and Development Party* (USDP).

Selama USDP mengendalikan pemerintahan (2011-2016), Jenderal Min Aung Hlaing berpengaruh besar dalam politik. Pemilu selanjutnya (2015) menghasilkan kemenangan NLD, namun tidak bisa menempatkan Suu Kyi sebagai Presiden karena dihalangi melalui konstitusi yang disusun oleh militer. Presiden saat itu, Htin Kyaw menciptakan posisi *State Counsellor* yang menempatkan Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan.

Pada periode tersebut hubungan militer dan pemerintahan Suu Kyi terlihat cukup baik, di mana Jenderal Min Aung Hlaing tampak beradaptasi dan bekerja sama, namun tetap terus memastikan kekuasaan militer dengan menghalangi setiap upaya NLD mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer. Suu Kyi bahkan mendapat kritik masyarakat internasional ketika dianggap memberikan pembelaan bagi militer Myanmar yang dituduh melakukan pembantaian etnis Rohingya. Kudeta 1 Februari 2021 menunjukkan hubungan yang sebaliknya. Ini menjadi pertanyaan banyak analis, apa yang mendorong militer melakukan kudeta kali ini, dan apa yang ingin dicapai dari kudeta ini?

Pihak militer Myanmar menyatakan, kudeta ini merupakan respons terhadap kecurangan pada pemilihan umum 2020. Pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidatonya menjanjikan pemilu baru yang bebas dan adil. Ia juga mengklaim pemerintahannya akan

berbeda dari rezim militer yang sebelumnya berkuasa selama 49 tahun dan bertindak brutal terhadap pengunjuk rasa pada 1988 dan 2007. Tetapi jika memperhatikan langkah-langkah yang berulang kali dijalankan militer untuk mempertahankan pengaruhnya, setidaknya kudeta ini dapat dilihat sebagai keputusan militer atas kemenangan mutlak yang dicapai NLD dari pemilu 2020. NLD memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Dominasi NLD di parlemen bisa membawa perubahan signifikan yang dapat berujung pada perubahan konstitusi yang melemahkan peran militer dalam politik.

Meskipun masih terlalu dini untuk memperoleh analisa yang meyakinkan, setidaknya bagaimana aksi militer mengambil alih kekuasaan dan menangani aksi protes dapat menjadi pertimbangan awal dalam memilih opsi strategi untuk mengupayakan proses demokratisasi Myanmar kembali pada jalurnya. Janji untuk 'pemilu baru yang adil' bertentangan dengan tindakan yang dilakukan. Pengambil-alihan pemerintahan sipil yang terpilih secara sah jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan Suu Kyi dan tokoh politik lainnya juga mengingatkan rakyat Myanmar akan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penculikan yang menyertai kudeta pada masa lalu.

Kudeta kali ini juga diikuti dengan pemberlakuan jam malam, pemutusan jaringan internet, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja dan penggunaan kekerasan guna menekan aksi protes.

Yang lebih mengkhawatirkan, kehadiran *Light Infantry Division* ke-77 dalam menghalau aksi demonstrasi. Divisi ini dianggap bertanggung jawab dalam eksekusi massal etnis Rohingya di Rakhine tahun 2017. Di samping serangkaian penyalahgunaan kekuasaan, sampai dengan lebih dari dua pekan militer berkuasa, belum ada laporan korban jiwa yang signifikan di pihak demonstran. Kekerasan selama protes berlangsung memang telah menurun dibandingkan saat pemerintahan junta militer sebelumnya.

Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener telah menyampaikan peringatan kepada wakil kepala junta militer Myanmar bahwa setiap penggunaan kekerasan terhadap demonstran akan memiliki konsekuensi berat, dan masyarakat internasional sedang mengawasinya. Peringatan ini sangat penting untuk melindungi rakyat Myanmar, terlebih peringatan itu disampaikan melalui saluran komunikasi yang sangat jarang terjadi antara junta dengan dunia luar. Ini bisa menjadi harapan bahwa mediasi masih mungkin dilakukan selama junta mau membuka komunikasi dengan dunia luar. Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia bersama ASEAN untuk mengembalikan keadaan Myanmar seperti semula.

Upaya yang Bisa Dilakukan ASEAN

Kudeta di Myanmar telah memicu desakan terhadap ASEAN untuk berperan lebih aktif. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN, meminta Myanmar mengupayakan dialog, rekonsiliasi dan normalisasi. Dengan merujuk Piagam ASEAN, Brunei meminta Myanmar mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi

hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan mengingatkan bahwa stabilitas politik di ASEAN sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera.

Respons ASEAN sejauh ini dinilai sangat lemah, terlebih negara anggota secara individual menunjukkan sikap yang berbeda. Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan menyebut kudeta tersebut merupakan urusan internal Myanmar. Menlu Filipina, Teodoro Locsin Jr. menganggap kejadian di Myanmar sebagai tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi demokrasi di negara itu. Pemimpin Kamboja, Hun Sen juga menyebutnya sebagai urusan dalam negeri dan menolak mengomentarkannya. Sementara Indonesia, Malaysia dan Singapura mengungkapkan kekhawatirannya atas situasi di Myanmar dan meminta semua pihak berdialog.

Sikap yang lebih tegas dan terbuka ditunjukkan oleh sejumlah negara dari luar kawasan. Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Eropa mengutuk kudeta dan penahanan oleh militer, serta deklarasi keadaan daruratnya. Pemerintahan Joe Biden bahkan sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Selandia Baru memutuskan hubungan dengan pemerintahan junta militer, menangguhkan bantuan dan melarang perjalanan para pemimpin militer Myanmar. Ini adalah aksi paling tegas yang dilakukan entitas negara atas kudeta Myanmar. Tidak semua negara mampu bersikap keras, misalnya China, India, dan Jepang.

Berbagai kepentingan memaksa negara tersebut lebih berhati-hati menyikapi perkembangan ini. Lalu bagaimana ASEAN harus merespons desakan untuk berperan lebih aktif? Jika uraian sebelumnya menyiratkan masih terbuka peluang untuk membantu mediasi, apa hambatan yang dihadapi ASEAN?

ASEAN memegang erat prinsip non-intervensi sejak organisasi kawasan ini terbentuk dan telah teruji dalam beberapa kesempatan. Reformasi 1998 di Indonesia dapat menjadi salah satu contoh bagaimana prinsip ini dipegang oleh ASEAN. Tidak ada negara anggota ASEAN yang berusaha campur tangan saat politik dalam negeri Indonesia bergejolak. Prinsip non-intervensi dianggap sebagai salah satu faktor penting yang membantu organisasi kawasan ini bertahan dan stabil.

Tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir, prinsip ini dalam skala yang minimal mulai melunak. Catatan sejarah ASEAN menunjukkan, prinsip non-intervensi pernah dikecualikan dalam beberapa kondisi, termasuk terhadap persoalan Myanmar. Pada tahun 2007, ASEAN pernah mencapai satu suara untuk menunda giliran keketuaan Myanmar di ASEAN, sebagai konsekuensi tindakan militernya pada Revolusi Saffron ketika puluhan ribu pendeta Budha turun ke jalan dan protes terhadap junta. Saat Topan Nargis melanda Myanmar tahun 2008, ASEAN juga bertindak di luar kebiasaannya. Ketika korban jiwa mencapai 134.000 orang dan junta menolak bantuan asing, ASEAN merespons kemarahan internasional atas buruknya penanganan bencana oleh pemerintahan militer Myanmar. ASEAN meyakinkan junta untuk

bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional dan ASEAN mengambil peran sebagai penyalur bantuan asing. ASEAN juga mendapat banyak kritik keras atas lemahnya peran ASEAN dalam merespons krisis Rohingya. Dengan prinsip non-intervensi ASEAN memang tidak bisa berbuat banyak atas setiap perkembangan di Myanmar. Namun terbukti, dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN mulai berani menyatakan sikap atas isu Rohingya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan ketua ASEAN dan deklarasi bersama yang dihasilkan oleh sejumlah KTT ASEAN.

Upaya panjang ASEAN untuk merangkul junta militer Myanmar juga merupakan catatan penting. ASEAN menerima keanggotaan Myanmar tahun 1997 dengan mengedepankan upaya “*constructive engagement*” agar junta mau lebih terbuka pada aspirasi rakyat dan berkompromi dengan Suu Kyi. Reformasi politik pada masa pemerintahan PM Thein Sein, pembebasan Aung San Suu Kyi, dan terbukanya jalan bagi NLD untuk kembali berperan dalam politik Myanmar, tidak dapat dipisahkan dari upaya ASEAN sejak Myanmar bergabung sebagai anggota. Kesediaan Myanmar atas kehadiran pemantau pemilu dari ASEAN pada pemilihan tahun 2012 juga perlu menjadi catatan.

Jika ASEAN berani lebih fleksibel dengan prinsip non-intervensi, peluang yang tersedia dapat digunakan untuk memberi tekanan terhadap pemerintahan militer Myanmar. Tekanan ini jika dilakukan secara kolektif, sekalipun tetap harus memperhatikan prinsip non-intervensi, masih bisa diharapkan

untuk mengembalikan proses demokrasi Myanmar pada jalurnya. Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk mendorong upaya ini.

Penutup

Mengembalikan militer Myanmar yang telah berkuasa selama puluhan tahun ke barak untuk menjadi tentara profesional bukan hal yang mudah. Kudeta 1 Februari 2021 mencerminkan ketidaksiapan militer untuk menyerahkan pemerintahan sepenuhnya kepada sipil. Di samping terjadinya penyalahgunaan kekuatan oleh militer, sejauh ini kudeta kali ini tampak lebih lunak dibanding yang pernah terjadi sebelumnya. Junta juga lebih terbuka terhadap dunia luar. Ini peluang yang harus dimanfaatkan ASEAN untuk berperan lebih aktif. Peran aktif tersebut membutuhkan keberanian ASEAN untuk lebih fleksibel dengan prinsip non-intervensi. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan parlemen, bisa mengambil peran sebagai pendorong negara anggota ASEAN lainnya menuju kesamaan sikap.

Referensi

“Myanmar Coup: Indonesia Rallies ASEAN Partners, US, and China for Solution to Political Crisis”, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3121945/myanmar-coup-indonesia-rallies-asean-partners-us-and-china>, diakses 16 Februari 2020.

“Ngeri, Ada Tentara ‘Pembantai Etnis’ Rohingya di Demo Myanmar”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210216092530-4-223590/ngeri-ada-tentara-pembantai-etnis-rohingya-di-demo-myanmar>, diakses 16

Februari 2020.
“PBB Peringatkan Myanmar Terkait Tanggapan Keras Kepada Pengunjuk Rasa”, <https://www.antarane.ws.com/berita/2002065/pbb-peringatkan-myanmar-terkait-tanggapan-keras-kepada-pengunjuk-rasa>, diakses 16 Februari 2020.

“Revolusi 22222’ yang Diikuti Ratusan Ribuan Orang untuk Menentang Perebutan Kekuasaan oleh Militer”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55968813>,

diakses 22 Februari 2020.

Siow, Maria. 2020. “Myanmar Coup: ASEAN Sitting on the Fence Shouldn’t be an Option”, <https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3120554/myanmar-coup-asean-sitting-fence-shouldnt-be-option>, diakses 15 Februari 2020.

Tan See Seng, “Commentary: ASEAN Can Do Better on Myanmar This Time”, <https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/myanmar-coup-junta-military-aung-san-asean-14111926>, diakses 15



Rizki Roza
rizki.roza@dpr.go.id

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran” (2010); “Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer” (2013); dan “Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan” (2013)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.